

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Jumat, 19 Oktober 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Kliping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Koran Tempo (Halaman, 17)	Jumat, 19 Oktober 2018	Pemerintah Perbanyak Pembiayaan Kerja Sama Badan Usaha	Pemerintah terus mencari cara untuk mengundang keterlibatan badan usaha swasta untuk membangun infrastruktur.
2	Koran Tempo (Halaman, 17)	Jumat, 19 Oktober 2018	Berita Foto	Pengerjaan Proyek jalan Trans Sumatera
3	Koran Tempo (Halaman, 17)	Jumat, 19 Oktober 2018	Baru 13 persen	Hingga Oktober 2018 pemerintah mencatat sudah ada 30 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang rampung.
4	Media Indonesia (Halaman, B1)	Jumat, 19 Oktober 2018	Infrastruktur PUPR Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pemerintah melakukan percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat.
5	Media Indonesia (Halaman, B3)	Jumat, 19 Oktober 2018	Kejaksaan Kawal Program Pembangunan Nasional	Kejaksaan Agung terus memperkuat tugas pendampingan melalui pelaksanaan program pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) dan tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah.
6	Media Indonesia (Halaman, B4)	Jumat, 19 Oktober 2018	Mengawal Efektivitas Pembangunan Infrastruktur	BPIW Bertanggungjawab mengawal proses pembangunan infrastruktur, mulai perencanaan hingga perawatan.
7	Media Indonesia (Halaman, B8)	Jumat, 19 Oktober 2018	Pariwisata Daerah Terus Tumbuh	Pembangunan tol di berbagai daerah yang dibarengi dengan pembangunan bandara berkontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata di daerah. Perekonomian daerah ikut bergeliat.
8	Media Indonesia (Halaman, B10)	Jumat, 19 Oktober 2018	Empat proyek Bendungan Besar Selesai	Empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menyelesaikan infrastruktur jalan nasional dan tol.
9	Kompas (Halaman Utama)	Jumat, 19 Oktober 2018	Bekasi Ajukan Evaluasi Kerja Sama	Polemik pembuangan sampah dari Jakarta ke Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali terjadi.
10	Kompas (Halaman, 14)	Jumat, 19 Oktober 2018	Berita Foto	Waduk Dawuhan Menyusut
11	Kompas (Halaman, 20)	Jumat, 19 Oktober 2018	Rehabilitasi Pun Dimulai	Rehabilitasi ribuan rumah warga yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat dimulai.
12	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 19 Oktober 2018	WIKA Bersiap Lepas Kepemilikan Sumo	PT Wijaya Karya Tbk. Bersiap melepas kepemilikan sahamnya di PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, badan usaha jalan tol Surabaya - Mojokerto
13	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Jumat, 19 Oktober 2018	Sarana Danau Toba Dipacu	Pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat penyediaan sarana-prasarana infrastruktur di Sumatra Utara, khususnya di wilayah Danau Toba, seiring dengan diraihnya investasi swasta untuk pengembangan pariwisata destinasi itu.
14	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 19 Oktober 2018	Berita Foto	Foto Udara proyek pembangunan jembatan teluk kendari yang merupakan jembatan terpanjang ke – 3 di Indonesia.
15	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Jumat, 19 Oktober 2018	Rantai Pasok Lebih Transparan	Kementerian PUPR memproyeksikan rantai pasok material dan alat konstruksi akan lebih transparan sejalan dengan penerapan system informasi material dan peralatan konstruksi atau SIMPK

Judul	Pemerintah Perbanyak Pembiayaan Kerja Sama Badan Usaha	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 17)		
Resume	Pemerintah terus mencari cara untuk mengundang keterlibatan badan usaha swasta untuk membangun infrastruktur.		

PEMERINTAH PERBANYAK PEMBIAYAAN KERJA SAMA BADAN USAHA

Minat pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dengan skema kerja sama meningkat.

Andi Ibnu
andi.ibnu@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah terus mencari cara untuk mengundang keterlibatan badan usaha swasta untuk membangun infrastruktur. Tahun depan, pemerintah memastikan akan mengerjakan proyek infrastruktur senilai Rp 9,38 triliun melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha *availability payment* (KPBUAP). "Semakin banyak yang ikut akan semakin meringankan beban fiskal negara," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019,

kata dia, tak bisa memenuhi semua keperluan pembangunan infrastruktur yang mencapai Rp 5.000 triliun. Setiap tahunnya, APBN paling banter hanya bisa menyediakan Rp 400 triliun. Karena itu, partisipasi badan usaha milik negara atau murni swasta juga jadi program yang mendapat perhatian penuh dari pemerintah.

Skema KPBU AP sebenarnya sudah diperkenalkan sejak 2017 dengan realisasi proyek Palapa Ring senilai Rp 7,8 triliun. Dengan skema ini, badan usaha yang mengerjakan suatu proyek infrastruktur bakal mendapat pembayaran jasa dan margin sesuai dengan kesepakatan begitu proyek beroperasi. Tahun

depan, proyek yang dibiayai dengan skema ini meluas ke sektor jalan Trans Sumatera, Pelabuhan Angrek Gorontalo, Pelabuhan Bau-Bau, jalur kereta Makassar, Pusat Pengolahan Limbah Sulawesi, dan jalan Trans Papua.

Deputi Bidang Pencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kennedy Simanjuntak, tak menampik penilaian bahwa target pembangunan lima tahunan sulit tercapai. Meski begitu, dia mengatakan saat ini sudah banyak minat dari kementerian dan pemerintah daerah untuk menggunakan skema KPBU. "Anehnya ada kecenderungan yang kepala daerahnya baru dan agak muda pasti minatnya tinggi," kata dia.

Kennedy mengatakan pemerintah terus melakukan sosialisasi skema pendanaan non-APBN.

Sosialisasi tak hanya ditekankan ke badan usaha, tapi juga ke sesama kementerian/lembaga. "Dengan KPBU, anggaran kementerian sebenarnya tidak bakal berkurang, justru bisa bertambah proyeknya," ujar Kennedy. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan, kata Ken, sudah makin rajin bangun infrastruktur dengan skema KPBU.

Hanya sedikit realisasi inisiatif pemerintah daerah yang menggunakan skema KPBU. SPAM Umbulan diinisiasi oleh bekas gubernur Soekarwo pada 2017 lalu. Tahun ini minat serius baru ditunjukkan oleh pemerintah daerah Gorontalo dalam pembangunan rumah sakit umum daerah. Ada juga Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah menyelesaikan studi kelayakan awal empat proyek: Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Piyungan,

Pelabuhan Tanjung Adikarto Kulonprogo, Sistem Penyediaan Air Minum-Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (SPAM-Kapet) Kulonprogo, dan Jogja Agro Techno Park (JATP). "Tangerang Selatan dan Banten juga sudah jalan, tapi masih kecil-kecil," kata Kennedy.

Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilaian Proyek PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Salustra Satria, mengatakan perseroan secara khusus ditugasi untuk memberikan *availability payment* untuk proyek yang secara finansial tidak *feasible* tapi memberikan efek ekonomi yang baik. "Supaya bisa menaikkan angka kewajaran hitungan pihak swasta," ujar dia. Selain itu, untuk meningkatkan minat pihak swasta, Salustra juga menjamin semua proses pembangunan dilakukan secara transparan.

Saat ini ada empat skema KPBU yang disediakan pemerintah. Selain KPBU AP, pemerintah punya produk kerja sama dengan penjaminan pemerintah, dengan pengembalian investasi melalui tarif, dan dukungan pemerintah untuk sebagian ongkos konstruksi. Selain KPBU, pemerintah memiliki skema tanpa penggunaan dana APBN sama sekali (PINA), yang bersumber dari berbagai instrumen obligasi,

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 17)		
Resume	Pengerjaan Proyek jalan Trans Sumatera		



Judul	Baru 13 persen	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (Halaman, 17)		
Resume	Hingga Oktober 2018 pemerintah mencatat sudah ada 30 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang rampung.		

Baru 13 Persen

Hingga Oktober 2018, pemerintah mencatat sudah ada 30 proyek yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional yang rampung. Gap jumlah yang rampung tersebut masih tergolong minim, melihat masih ada 223 proyek yang mengantre untuk dirampungkan:

10 PROYEK KPBU AP 2019

- Pengembangan Pelabuhan Bau-Bau
- Pengembangan jalur kereta
- Preservasi jalan Trans Papua
- Pengembangan Pelabuhan Angrek
- Pengembangan pusat pengolahan limbah
- Preservasi jalan lintas timur Riau
- Pembangunan pusat pengolahan limbah Sumatera
- Preservasi jalan dan jembatan lintas tengah dan barat Sumatera
- Penggantian jembatan lintas Trans Jawa
- Proving ground BPLJSKB Bekasi

RAPOR PROYEK STRATEGIS NASIONAL

▼ Jumlah Proyek:

223 proyek + 3 program
(sektor: jalan; bendungan; kawasan; kereta api; energi; pelabuhan; air dan sanitasi; bandar udara; irigasi; smelter; teknologi; perumahan; pertanian; tanggul laut; pendidikan)

▼ Kebutuhan dana:

Rp 4.150 triliun

▼ Alokasi pemerintah:

Rp 428 triliun

▼ Badan usaha milik negara:

Rp 1.273 triliun

▼ Badan usaha swasta:

Rp 2.449 triliun

PERKEMBANGAN HINGGA OKTOBER 2018

▼ Jumlah total proyek rampung:

30 proyek

▼ Proyek rampung tahun ini:

Kereta Prabumulih-Kertapati (Trans Sumatera); Bendungan Rakomano (NTT)

PROGRES TERBARU

- Isu perencanaan dan persiapan **38 persen**
- Isu pembebasan lahan **36 persen**
- Isu pelaksanaan konstruksi **12 persen**
- Isu pendanaan **8 persen**
- Isu perizinan **6 persen**

SUMBER: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KEMENTERIAN KOORDINATOR PERENCANAAN

Judul	Infrastruktur PUPR Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, B1)		
Resume	Pemerintah melakukan percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat.		

Infrastruktur PUPR Mendukung Pertumbuhan Ekonomi



Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR

Pemerintah melakukan percepatan proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi untuk dapat direalisasikan dalam kurun waktu yang singkat. Hal itu

dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pentingnya pembangunan infrastruktur, selain untuk kepentingan pembangunan ekonomi, pembangunan infrastruktur juga mampu meningkatkan persaingan, persaudaraan dan rasa keadilan dalam berbagai bidang.

Selanjutnya 245 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tersebar di seluruh Indonesia telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional.

Kementerian PUPR melalui perencanaan dan penugasan yang dibantu Badan Pengkajian Infrastruktur Wilayah (BPIW) turut andil dalam memberi dukungan terhadap percepatan pelaksanaan PSN tersebut.

Hal tersebut terutama untuk mendukung kawasan perbatasan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Industri (KI), Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan, serta Jembatan pangan nasional.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, menyatakan instanlynya fokus membuat perencanaan dan program dukungan infrastruktur terhadap kawasan tersebut.

"Program dan kegiatan kami tersebut diatas berdampak riil pada pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional," ucap Hadi.

Sebagai contoh, pembangunan bendungan baru dari tahun 2015-2019 sebanyak 65 buah, dapat meningkatkan produksi pertanian di kawasan hulu yang akan menurunkan biaya logistik," ucapnya.

Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPSAMD) dan sistem pengolahan persampahan, sanitasi dan perbaikan perumahan akan meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) dan penurunan kemiskinan di tanah air.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan tahun ini disebutkan bahwa pada 2015 IPM Indonesia mencapai 69,53. Pada 2016 meningkat menjadi 70,18. Angka IPM ini kembali meningkat pada 2017, yakni mencapai 70,81.

Berlaskan data yang dikeluarkan tahun ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan pada 2015 mencapai 11,1%. Persentase kemiskinan itu menurun pada 2016, yakni menjadi 10,70%. Kemudian pada 2017 kembali menurun menjadi 10,12%. Pemerintah menargetkan pada 2018 angka kemiskinan turun menjadi 9,5%.

Selain itu, secara agregat, in-



SURVEY LAPANGAN: Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono (kiri) melakukan koordinasi bersama tim ITDC ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Infrastruktur PUPR yang dibangun juga mendukung pengurangan Gini ratio menjadi 0,389% pada Maret 2018 (data BPS).

Pembangunan Infrastruktur

PUPR akan berdampak positif pada peningkatan perekonomian lokal dan nasional serta kesejahteraan masyarakat di Tanah Air. (52/25)

REKAPITULASI CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR Tahun 2015-2018

Sektor	Salah	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Target 2018	Target 2019
Divisi Jendral: Sumber Daya Air						
Pembangunan Bendungan Baru	buah	25	8	6	14	8
Bendungan Deltas	buah	5	2	2	8	11
Pembangunan Jaringan Irigasi (JAPI) dan SPM	km	275.252	1.138.881	227.743	220.079	198.478
Rehabilitasi Jaringan Irigasi (RJPI) dan SPM	km	1.170.524	581.888	300.300	384.717	270.888
Pembangunan Air Baku	m3/detik	6,81	5,15	4,54	4,78	5
Pembangunan Embung	buah	342	387	117	88	138
Pengelolaan Lahan & Sedimen	buah	190	48	31	31	13
Pengelolaan Pantai	km	44,88	48,51	26,42	21,64	11
Pengelolaan Bayu	km	34,35	191,48	101,21	190,76	38
Divisi Jendral: Bina Marga						
Pembangunan Jalan Tol	km	131	44	399	615	642
Pembangunan Jalan Nasional	km	1.286	258	715	452	732
Pembangunan Jalan	km	7.813	6.942	9.473	15.373	16.028
Pembangunan Jalan Regional	km	1.929	1.171	67	58	102
Pembangunan Jembatan	m	8.884	4.088	714	954	8.213
Pembangunan Jalan Nasional	km	35.437	45.715	46.573	46.814	46.954
Pembangunan Jembatan	m	384.423	382.713	494.769	494.699	496.852
Divisi Jendral: Cipta Karya						
Pembangunan Cipta Karya Air Minum	%	79,97	71,74	72,72	73,81	75,14
Perbaikan Lahan Kotoran Kotoran Perkotaan	ha	3.143	1.483	5.962	1.991	1.544
Pembangunan Cipta Karya Sanitasi	%	42,14	67,8	73,87	76,76	81,84
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	km	7.920	1.786	4.697	3.423	2.548
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Limbah	km	1.145.520	304.800	473.658	477.488	323.787
Pembangunan Sistem Penyediaan Persampahan	km	2.715.580	478.250	2.135.254	1.081.535	958.281
Divisi Jendral: Pengendalian Perumahan						
Pembangunan Rumah Susah	unit	18.452	1.748	13.251	14.458	1.512
Pembangunan Rumah Perkotaan	unit	6.712	6.542	5.047	4.557	1.738
Pembangunan dan Pemeliharaan Kualitas Rumah Strategis	unit	82.254	97.888	110.880	188.308	200.880
Penyediaan PSU Perumahan	unit	29.158	35.884	77.288	27.530	11.888
Divisi Jendral: Pemertan Perumahan						
Penyediaan Baitan Pembangunan Perumahan	unit	88.678	183.258	211.480	287.880	300.880

Sumber: Kementerian PUPR, 2018

Beberapa Infrastruktur yang Sudah Dibangun

Jalan Nasional

1. Jalan perbatasan di Kalimantan Barat, telah selesai mencapai 170 km.
2. Jalan perbatasan MPT, telah selesai mencapai 170 km.
3. Jalan Trans Papua, di mana salah satu Papua Barat selesai 100 persen yakni 1.071 km dari Papua mencapai 3.143 km.

Jalan Tol

1. Jalan tol Gempol - Pabelan, mulai operasi 12 Juni 2015
2. Jalan tol Surabaya-Mojokerto, telah selesai 4, mulai operasi 14 Agustus 2016
3. Jalan tol Merak-Tangerang, telah selesai 10 April 2017
4. Jalan tol Balikpapan - Tenggarong, telah selesai 18 dan 28, mulai beroperasi 21 Januari 2018

Jembatan

1. Jembatan Lajang, Kalbar
2. Jembatan Irtidjamp, Papua
3. Jembatan Gantung Kali Sempit, Jember
4. Jembatan Gantung Cemping, Indragiri

Perumahan

1. Rumah Susah Kabupaten Tembung
2. Rumah Perkotaan, Bengkulu
3. Rumah Perkotaan, Jember
4. Rumah Perkotaan, Petai dan Lela, Pulau Jawa

Pembangunan SPAM

1. SPAM Cirebon, Jawa Tengah
2. SPAM Regional Kota Sural, DIY
3. SPAM Gresik, Jawa Timur
4. SPAM KIK Candi, Kalbar

Pos Lintas Batas Negara

1. PLBN Arak, Kalbar
2. PLBN Nongplak, Kalbar
3. PLBN Sempu, Papua
4. PLBN Bera, NTT
5. PLBN Candi, Kalbar

TPA

1. TPA Regional Tumbang
2. TPA Regional Banjarbaru

Bendungan

1. Bendungan Rindin dan Rindin di RIT
2. Bendungan Mili, Bendungan Kumpang di Jawa
3. Bendungan Gombang dan Ligung di Jember
4. Bendungan Sari Dimp di Petai, Jawa
5. Bendungan Sintang Huta di Bera
6. Bendungan Posing di Suber

Referensi

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Undang-Undang No. 1/2018
3. KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
4. BPIW (Badan Pengkajian Infrastruktur Wilayah)
5. KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)
6. KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional)

Sumber: Kementerian PUPR



Beberapa Dukungan Infrastruktur Kementerian PUPR di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



Beberapa Dukungan Infrastruktur Kementerian PUPR di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



Judul	Kejaksanaan Kawal Program Pembangunan Nasional	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, B3)		
Resume	Kejaksanaan Agung terus memperkuat tugas pendampingan melalui pelaksanaan program pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) dan tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah.		

Kejaksanaan Kawal Program Pembangunan Nasional

Kejaksanaan Agung terus memperkuat tugas pendampingan melalui pelaksanaan program pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) dan tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).

GOLDA EKS
golda@mediaindonesia.com

KORPS Adhyaksa berkomitmen untuk selalu hadir dalam mengurus, melayani, melindungi, dan memberikan rasa aman bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kejaksanaan pun merasa ikut bertanggung jawab pada pelaksanaan reformasi dan revitalisasi hukum, seperti yang dinyatakan dalam program Nawacita pemerintahan Jokowi-JK.

Komitmen itu sekaligus mempertegas bahwa negara harus kuat dan tidak lemah, khususnya ketika melaksanakan pelbagai tugas dan tanggung jawab penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan. Penerapan hukum dan penegakan hukum harus sesuai dengan koridor, benar, bermartabat, dan tepercaya.

Di sisi lain, sejumlah program pembangunan yang menyangkut proyek strategis nasional juga harus dilaksanakan dengan benar

agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Proyek tersebut tidak boleh terhambat dengan pelanggaran hukum seperti dugaan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan pihaknya akan terus memperkuat tugas pendampingan melalui pelaksanaan program pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan (TP4) dan tim pengawal pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).

"Melalui program tersebut, diharapkan, di masa depan tidak ada lagi proyek yang tidak dilaksanakan dengan alasan pejabat negara takut melanggar ketentuan hukum," ujar Prasetyo kepada *Media Indonesia*, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pendampingan yang dilakukan aparat kejaksanaan akan menyadarkan para pejabat mengenai rambu-rambu hukum. Dengan demikian, niscaya seluruh pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik, penyerapan anggaran maksimal, dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Program lain yang mendesak

dilaksanakan ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kejaksanaan. Ia mengakui bahwa saat ini kepercayaan publik terhadap kejaksanaan masih rendah akibat ulah segelintir jaksa bermasalah. Maklum, masih ada jaksa yang terjerat kasus hukum, seperti kasus penyalahgunaan narkoba hingga korupsi.

"Kita mesti terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan disiplin para jaksa sehingga dapat terbentuk jaksa yang mumpuni, mandiri, dan terpuji. Para jaksa mesti menahan diri untuk tidak terjerumus dalam pelanggaran hukum. Tantangan berat kita ialah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kejaksanaan."

Tidak berhenti

Prasetyo berjanji tidak akan berhenti menangani perkara korupsi, apalagi kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Korps Adhyaksa ingin

memastikan di sisa pemerintahan Jokowi-JK seluruh program pembangunan itu dapat berjalan tanpa cela.

"Penindakan kita lakukan sejalan dengan pencegahan. Tapi, bukan berarti dengan pencegahan itu, penindakan tidak kita lakukan," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, apabila dalam realitasnya ternyata penyidik bidang pidana khusus menemukan indikasi adanya praktik lencung, otomatis penindakan atau represif pasti dilakukan. Meski demikian, kejaksanaan juga lebih menekankan pada upaya pencegahan.

Dalam prosesnya, imbuh dia, penyidik pasti intens berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti KPK, Polri, PPATK, BPK, dan BPKP. Koordinasi tersebut bertujuan memudahkan penanganan kasus serta memberikan dampak preventif agar tercipta efek jera. (Gol/P-1)



JALIN KERJA SAMA:
(Kiri-kanan) Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Jaksa Agung HM Prasetyo melakukan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) di Kejaksanaan Agung, Jakarta, Kamis (1/3). Kejaksanaan Agung jalin kerja sama kawal pembangunan infrastruktur bersama Kementerian PU-Pera, Kemenhub, dan Kementerian BUMN.

Judul	Mengawal Efektivitas Pembangunan Infrastruktur	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, B4)		
Resume	BPIW Bertanggungjawab mengawal proses pembangunan infrastruktur, mulai perencanaan hingga perawatan.		

Mengawal Efektivitas Pembangunan Infrastruktur

BPIW bertanggung jawab mengawal proses pembangunan infrastruktur, mulai perencanaan hingga perawatan.

ANDHKA PASISTYO
Andhka@medianas.com

PEMBANGUNAN infrastruktur menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Hal itu disebabkan melalui infrastruktur, diharapkan perekonomian bisa lebih merata. Infrastruktur pun tidak cuma jalan, tetapi juga jembatan, bendungan, hingga sarana penunjang, seperti sanitasi dan air bersih. Dengan tersedianya berbagai fasilitas infrastruktur, kualitas maupun taraf hidup masyarakat bisa meningkat.

Lembaga yang paling bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur, tentu saja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Namun, ada satu bagian dari instansi ini yang memegang peran paling krusial, yakni Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Badan ini bertanggung jawab mengawal proses pembangunan infrastruktur, mulai perencanaan hingga perawatan. Tanpa adanya proses perencanaan yang matang, infrastruktur yang terbangun diyakini tidak akan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh masyarakat.

Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljau mengatakan dalam membangun infrastruktur, tentu pemerintah memperhatikan berbagai aspek di wilayah yang akan menjadi target pembangunan. Pembangunan infrastruktur di suatu daerah, menurutnya, harus diikuti juga dengan pengembangan sektor-sektor produktif dalam kawasan.

"Maka dari itu, diperlukan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, tetapi juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat," ujarnya.

Di sinilah peran BPIW menjadi kunci. Secara rinci, badan ini bertanggung jawab dalam merencanakan dan merencanakan pembangunan di perbatasan, perdesaan, perkotaan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Kawasan Industri.

Seluruh pembangunan itu harus dijalankan dengan tahap yang runtut tanpa mendahului satu sama lain, mulai survei, investasi, desain, akuisisi lahan, konstruksi, operasional, hingga perawatan. Dengan demikian, semua proses pengerjaan kegiatan dan hasil dari pembangunan akan terpadu dan memberikan manfaat yang optimal.

Sebagai contoh ialah KSPN Danau Toba di Sumatera Utara. Kepala BPIW Hadi Surahyeno mengungkapkan, seluruh pembangunan di kawasan itu, mulai akses jalan, perumahan, hingga sanitasi direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu untuk mendukung daerah wisata tersebut.

Semua pengerjaan itu selanjutnya berada di bawah empat Direktorat yang berbeda. Pembangunan jalan berada di bawah Ditjen Bina Marga, ketersediaan air menjadi tanggung jawab Ditjen SDA dan perumahan ada di Ditjen Penyediaan Perumahan.

"Ini yang kami padukan. Jadi Danau Toba, kami berikan akses jalan. Kemudian di sana kami berikan sanitasi untuk kebutuhan wisatawan. Perumahan kami kerjakan dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk dijadikan home stay."

Jadi semua dikerjakan secara terpadu sehingga pengembangan wilayah menjadi lebih baik," jelas Hadi kepada Media Indonesia, Rabu (17/10). Begitu pun dengan membangun bendungan. Dalam membangun bendungan, BPIW tentu telah memastikan kemana peredaran air bisa disalurkan sehingga sumber daya alam yang ada bisa dimanfaatkan maksimal bagi masyarakat.

"Kalau mau bangun perumahan di sekitar bendungan tentunya kami pastikan di mana yang paling tepat," tambahnya.

Pemerintah menyadari untuk membangun infrastruktur dana yang tersedia pun terbatas. Oleh karena itu, berbagai skema pembiayaan pun mulai dipikirkan, termasuk dengan melibatkan swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam pertemuan tahunan dana moneter internasional dan bank dunia di Bali, pekan lalu, sejumlah proyek infrastruktur pun ditawarkan kepada para investor, baik itu pembangunan jalan maupun transportasi (lihat grafik, E-2).

Inovasi Pembiayaan untuk Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Indonesia menawarkan kepada investor 78 proyek dari 21 BUMN dengan nilai total US\$42,1 miliar dalam pertemuan tahunan IMF – World Bank di Bali, 8-14 Oktober 2018.



Pembangunan Infrastruktur Indonesia selama Masa Pemerintahan Jokowi-JK

Target Berbagai Macam Pembangunan Infrastruktur (2013 hingga 2019)

- 1.800 km tol
- 2.159 km kereta api antar kota
- 24 perabuhan baru
- 15 bandara baru
- 35.000 kwh pembangkit listrik

Proyek Strategis Nasional (PSN)

- 223 proyek dan 3 program, dengan perkiraan total nilai investasi sebesar US\$307,4 miliar.

Realisasi

- 32 proyek telah selesai.
- 44 PSN sedang dalam operasi parsial.
- Program listrik sebesar 2.278 MW sudah beroperasi.



JALAN TOL: Suasana Proyek Pembangunan ruas jalan Tol Balikpapan-Samarinda (MPC) Sekeloa V rute Km 13-SPN bagian di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (7/9). Pembangunan ruas jalan Tol Balikpapan-Samarinda bagian dari Proyek Strategis Nasional sepanjang kurang lebih 99 kilometer yang terbagi dalam lima seksi itu ditargetkan selesai pada April 2019.

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Tim Tisat M

Judul	Pariwisata Daerah Terus Tumbuh	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, B8)		
Resume	Pembangunan tol di berbagai daerah yang dibarengi dengan pembangunan bandara berkontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata di daerah. Perekonomian daerah ikut bergeliat.		



TOL CIPALI: Kendaraan melintas di Jalur Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat, Selasa (19/6). Pembangunan infrastruktur Tol Cipali berdampak pada terdongkraknya pada sektor pariwisata di Cirebon dan sekitarnya serta perekonomian masyarakat setempat.

Pariwisata Daerah Terus Tumbuh

Pembangunan tol di berbagai daerah yang dibarengi dengan pembangunan bandara berkontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata di daerah. Perekonomian daerah ikut bergeliat.

NURUL HIDAYAH
nurul@mediaindonesia.com

PEMBANGUNAN tol di berbagai wilayah telah mengubah peta perekonomian di daerah. Pembangunan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali), misalnya, telah mengubah tingkat kunjungan masyarakat ke Cirebon dan sekitarnya. "Keberadaan tol bisa meningkatkan kunjungan

pariwisata untuk Cirebon dan sekitarnya," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRD) Kota Cirebon, Imam Reza Hakiki, Selasa (16/10).

Tingkat okupansi hotel, khususnya di setiap akhir pekan, meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya.

Dijelaskan Kiki, keberadaan Tol Cipali yang memiliki panjang 116,5 km dan melewati Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka serta Kabupaten Cirebon telah mempercepat waktu tempuh, khususnya dari Jakarta menuju Cirebon. Akibatnya, di saat libur akhir pekan, tingkat hunian hotel juga meningkat. "Tingkat hunian hotel di Kota Cirebon saat akhir pekan minimal di angka 80%. Bahkan ada pula yang 100%," ungkap Kiki.

Namun, pada hari-hari biasa, menurut Kiki, tingkat hunian hotel hanya berkisar 55% hingga 60%. Padahal, lanjut Kiki,

keberadaan tol memiliki potensi yang besar untuk memajukan pariwisata di Kota Cirebon, apalagi sejak beroperasinya Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

Oleh sebab itu, Kiki mendesak agar pemerintah daerah segera menyelenggarakan pembangunan di daerahnya dengan keberadaan Tol Cipali tersebut. "Apalagi sekarang sudah ada Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati."

Naiknya tingkat kunjungan juga dirasakan salah satu hotel di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. "Hari-hari biasa juga ramai. *One day city tour* selalu ramai," ungkap Yuni Listiawati, Humas Hotel Graze Sangkan, Kuningan.

Penjabat Wali Kota Cirebon, Dedi Taufik, yang juga menjabat Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat meminta kepada pemerintah daerah untuk menyinergikan pembangunan di daerah mereka dengan adanya Tol Cipali dan BIJB Kertajati. "Agar Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan daerah

lainnya juga mendapatkan manfaat dari adanya tol dan BIJB Kertajati ini," ungkap Dedi.

Pertumbuhan pariwisata

Berbeda dengan Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan yang terletak di daerah pegunungan memang menawarkan keindahan dan kesejukan alamnya kepada wisatawan yang datang ke daerah mereka. Dengan adanya Tol Cipali yang memperpendek waktu tempuh Jakarta-Cirebon dan daerah sekitarnya, Kabupaten Kuningan kini menjadi salah satu daerah pilihan warga Jakarta untuk melewati liburan bernuansa alam selain Bogor. Yuni pun berharap pemerintah daerah tetap mempertahankannya dan semakin serius menggarap berbagai potensi wisata bernuansa alam di daerahnya. "Apalagi sekarang ada BIJB Kertajati," ungkap Yuni.

Gairah perekonomian juga dirasakan masyarakat Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejak diresmikannya Pangkalan Udara Wiradinata di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya menjadi bandara sipil oleh Presiden Joko Widodo pada 2017, geliat usaha mikro, kecil, dan menengah mulai terlihat.

Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan beroperasinya Bandara Wiradinata, yang baru melayani rute Tasikmalaya-Halim Perdanakusuma, Tasikmalaya-Solo, dan Tasikmalaya-Yogyakarta, telah banyak investor yang ingin berinvestasi di Kota Kreatif itu. *Runaway* yang panjangnya 1.600 meter kini akan diperpanjang menjadi 1.900 meter, berbarengan dengan pembangunan terminal bandara.

"Keberadaan bandara ini bisa mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat," kata Budi.

Selain bandara, akan dibangun tol sepanjang 263 km di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, yang diharapkan bisa mendorong perekonomian di Priangan Timur.

Gairah sektor pariwisata juga dirasakan masyarakat Kabupaten

Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Pemerintahan Jokowi-JK telah menetapkan Belitung sebagai satu dari 10 destinasi pariwisata baru tahun ini. Kabupaten Belitung kini ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata.

Status KEK pariwisata ini berpengaruh langsung terhadap pengembangan usaha perhotelan di daerah tersebut, dan penyerapan tenaga kerja. Wakil Bupati Belitung Isyak Meirobie membenarkan sejak Tanjung Kalayang menyandang KEK, kunjungan wisatawan ke daerah itu meningkat. "Pertumbuhan hotel dan kuliner luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kreatif dan kepariwisataan terus tumbuh," kata Isyak.

"Pertumbuhan hotel dan kuliner sudah luar biasa, pertumbuhan ekonomi kreatif dan kepariwisataan, terus tumbuh," kata Isyak.

Seiring dengan ditetapkannya KEK Pariwisata Tanjung Kalayang, lanjutnya, berdampak terhadap pembangunan infrastruktur jalan. "Masa kepemimpinan Jokowi sangat membantu dan memudahkan Belitung yang sedang tumbuh. Ibarat orang tua, benar-benar diasuh dengan gizi yang baik agar Belitung secara perlahan dapat mandiri," ujarnya.

Bukan itu saja, lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung ini, di masa Joko Widodo, Bandara HAS Hanandjoedin ditetapkan sebagai bandara internasional, turis Singapura dan negara lain sudah bisa langsung ke Belitung," tambahnya.

Di sisi lain, saat ini Belitung akan mempunyai dermaga internasional khusus kapal-kapal *yatch* di Tanjung Pandan.

Anggaran percepatan pertumbuhan pariwisata Belitung sudah banyak dikucurkan. "Dampak percepatan pembangunan pariwisata ini mampu memancing para investor untuk berinvestasi di Pulau Belitung," tambahnya. (AD/RF/N-2)

Judul	Empat proyek Bendungan Besar Selesai	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (Halaman, B10)		
Resume	Empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menyelesaikan infrastruktur jalan nasional dan tol.		

Empat Proyek Bendungan Besar Selesai

Empat tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak hanya menyelesaikan infrastruktur jalan nasional dan tol. Proyek infrastruktur untuk menunjang perekonomian petani sekaligus penanggulangan banjir/kekeringan dikerjakan tepat waktu.

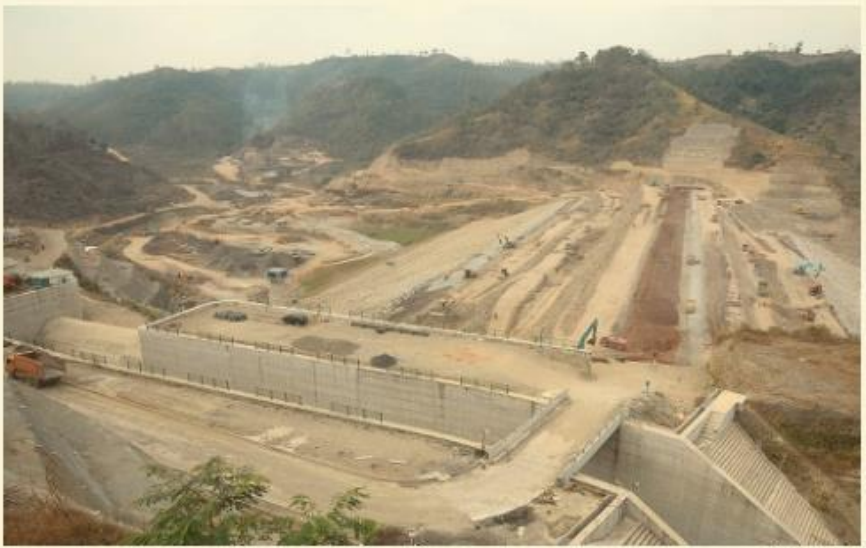
AKHMAD SAFUAN
achmad_safuan@mediaindonesia.com

BENCANA banjir saat musim penghujan dan kekeringan saat musim kemarau bagi warga Kudus dan sekitarnya selama ini menjadi pemandangan umum. Untuk mengatasi kondisi itu pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi berupaya membangun Bendungan Logung yang terletak di Desa Kandangmas, Kecamatan Dawe, dan Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.

Pembangunan Bendungan Logung mulai dikerjakan pada 2014, dianggarkan pemerintah pusat melalui APBN sebesar Rp604,15 miliar. Bendungan itu bakal berfungsi menahan dan menyimpan air dari meningkatnya debit Sungai Juwana saat musim hujan. Sebaliknya, mampu mengalirkan ke ratusan hektare sawah saat musim kemarau.

Proyek itu ditargetkan pada November 2018 mulai difungsikan.

Bendungan dengan luas area konstruksi mencapai 21,67 hektare dan mampu memenuhi laasan genangan air mencapai 144,06 hektare ketika sudah mulai beroperasi itu tidak saja mengatasi bencana banjir dan kekeringan di wilayah Kudus dan sekitarnya, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan sekitar bendungan dengan rampungnya area



IRIGASI DAN PENYEDIA AIR BERSIH: Pembangunan bendungan logung di Desa Tanjungrejo, Kudus, Jawa Tengah. Pembangunan bendungan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tersebut diharapkan berguna sebagai penyedia air bersih, irigasi, serta pengendali banjir.

green belt (sabuk hijau) yang mengelilingi bendungan seluas 43,71 hektare.

"Pemerintah Kabupaten Kudus sangat bangga dan senang dengan selesainya pembangunan Bendungan Logung ini karena dua permasalahan yang dihadapi warga dan petani, yakni banjir dan kekeringan dapat diatasi sekaligus," kata Bupati Kudus M Tamzil saat meninjau pembangunan bendungan, Selasa (16/10).

Dengan selesainya proyek Bendungan Logung ini, Tamzil mengatakan, Pemkab Kudus segera akan melakukan langkah-langkah sosialisasi kepada warga baik di sekitar bendungan maupun warga Kudus lainnya tentang fungsi dan pemanfaatan bendungan bagi mereka. "Bendungan ini juga akan menjadi sarana tempat wisata yang mampu meningkatkan ekonomi warga," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali

Juana Ruhban Ruzziyatno mengatakan pembangunan Bendungan Logung selesai 100% pada awal November mendatang sehingga memasuki musim penghujan nanti akan mulai diisi air.

"Diperkirakan, pengisian membutuhkan waktu selama satu musim penghujan, yakni mulai pertengahan November dan saat musim kemarau dibuka untuk kebutuhan pengairan warga," kata Ruhban.

Bendungan Logung, selain mampu mengairi sawah seluas 5.355 hektare, jelas Ruhban, akan menjadi penahan air saat musim penghujan dan mengurangi banjir sebesar 35% karena menampung air sekitar 20,15 juta meter kubik.

Selain itu, lanjutnya, bendungan itu juga direncanakan untuk memenuhi kebutuhan air baku untuk masyarakat dan industri sebesar 200 liter per detik bagi 130.909 jiwa yang tinggal di Kota Kudus dan sekitarnya.

"Bendungan ini juga menjadi tempat pariwisata serta pembangkit listrik mikrohidro sebesar 0,5 megawatt," imbuhnya.

Sementara itu, data yang dihimpun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) menyebutkan bersamaan dengan selesainya pembangunan Bendungan Logung, Jawa Tengah, pemerintah juga telah menyelesaikan delapan bendungan lainnya di Indonesia tahun ini dengan kapasitas seluruhnya 288 juta meter kubik.

Sejak kepemimpinan Presiden Jokowi pula, selain di Jawa, bendungan yang dibangun sejak 2014 dan mulai dapat beroperasi akhir 2018 ialah Bendungan Rotikot di NTT, Bendungan Tanju, Milla, dan Bintang Bano di NTB, Bendungan Sei Gong di

Batam, Bendungan Sindang Heula di Banten, dan Bendungan Paselloreng di Sulawesi Selatan.

Di NTT, Jokowi juga telah membangun tiga pos lintas batas negara (PLBN), yakni Motamasin, Motaain, dan Wini. Tiga PLBN lagi akan dibangun pada 2019, yakni Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Oepoli di Kabupaten Kupang, dan Maritaing di Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.

"Ada kabar PLBN di Oepoli dibangun tahun depan. Mudah-mudahan segera terealisasi. Kami juga mengharapkan jalan dari Kupang ke Oepoli di perbatasan dengan Timor Leste segera diaspal," kata Tum Kameo, tokoh masyarakat Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Selasa (16/10).

Dia mengharapkan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia yang berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Leste, itu digenot sehingga akses masyarakat ke kota menjadi lancar dan cepat. "Jarak dari perbatasan Oepoli ke Kupang kurang dari 200 kilometer, tapi ditempuh selama sekitar 12 jam karena kondisi jalan yang belum beraspal," ujarnya.

Selama empat tahun pemerintahan Jokowi, juga dilakukan pembangunan ruas jalan sabuk merah di perbatasan RI-Timor Leste. Ruas jalan sabuk merah yang sudah dibangun membentang sepanjang 179 kilometer, menghubungkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di Belu dan PLBN Motamasin di Malaka, dijadwalkan rampung akhir tahun ini.

Selanjutnya, pembangunan sektor barat di wilayah Timor Tengah Utara, menghubungkan PLBN Wini dan PLBN Napan sepanjang 130 kilometer. (PO/N-3)

Judul	Bekasi Ajukan Evaluasi Kerja Sama	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman Utama)		
Resume	Polemik pembuangan sampah dari Jakarta ke Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali terjadi.		

Bekasi Ajukan Evaluasi Kerja Sama

BEKASI, KOMPAS — Polemik pembuangan sampah dari Jakarta ke Kota Bekasi, Jawa Barat, kembali terjadi. Pemerintah Kota Bekasi meminta adanya evaluasi kerja sama pembuangan sampah dari Ibu Kota. Permintaan ini diajukan karena pengangkutan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang dinilai merugikan warga.

Terkait masalah ini, jalur dari Jakarta yang melalui Tol Bekasi Barat menuju Bantargebang dalam waktu dekat dikosongkan dari truk sampah. "Dari hasil keputusan rapat evaluasi, akan ada sterilisasi jalan secepatnya," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana, Kamis (18/10/2018), di Bekasi.

Menurut Yayan, jumlah truk sampah yang melintas di Tol Bekasi Barat terlalu banyak. Dia menggambarkan, dari 100 kendaraan di tol tersebut, 60 di antaranya truk sampah. "Warga mengeluhkan bau dan debu, serta mengakibatkan jalan rusak," kata Yayan.

Dari hasil operasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi, truk sampah Jakarta juga kerap tidak dilengkapi surat-surat kendaraan. Selain itu, kata Yayan, masih ada pula sejumlah truk yang tidak dilengkapi penutup sampah atau penutupnya tidak rapi. Sebagian truk sampah mengucurkan cairan lindi yang menebar bau busuk.

Membatasi truk

Atas pertimbangan ini, aparat Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencegat perjalanan 25 truk sampah itu di Pintu Tol Bekasi Barat, Rabu (17/10). Pada Kamis kemarin, petugas Dinas Perhubungan masih mengawasi truk sampah melintas di jalur itu. Namun, sopir truk mengalihkan perjalanannya ke rute lain, yakni melalui kawasan Cibubur dan Jatiasih.

Agus, sopir truk sampah, saat dihubungi *Kompas*, mengatakan, jalur Cibubur dan Jatiasih lebih aman dari pencegatan petugas. "Lewat Jatiasih sementara aman, Bekasi Barat belum

Sampah Jakarta yang Masuk ke Bantargebang

Rata-rata sampah per hari (ton)



Kisruh Sampah Jakarta di Bantargebang

2015	2016	18-19 Oktober 2018
Pemprov DKI Jakarta mengancam memutus kontrak dua operator TPST Bantargebang (PT Godang Tua Jaya dan Navigat Organic Energy Indonesia) terkait kinerja.	- DPRD Kota Bekasi mengancam akan menutup TPST Bantargebang. - Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Rp 400 miliar per tahun untuk biaya pengolahan sampah di Bantargebang.	Puluhan truk sampah DKI Jakarta sempat dihentikan Dishub Kota Bekasi untuk pengecekan kelengkapan surat dan evaluasi kerja sama DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi dalam pengangkutan sampah.

Sumber: Litbang Kompas/ERN/TPN diolah dari Pemprov DKI Jakarta, BPS DKI Jakarta, dan pemberitaan Kompas



INFOGRAFIK: DECKY

bisa dilewati," ujar Agus.

Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menilai perlu ada evaluasi perjanjian kerja sama pembuangan sampah dari Jakarta. Ada beberapa hal, kata Tri, yang tidak dipenuhi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bukan terkait dengan TPST Bantargebang saja, tetapi juga soal kemitraan antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau salah satu pihak mulai tidak nyaman dan mengingkari perjanjian, kerja sama bisa saja diubah," ujar Tri.

Menurut Tri, kemitraan yang dibangun seharusnya bersifat seajar. Karena itu, DKI juga harus peduli dengan sejumlah

persoalan yang dihadapi Pemkot Bekasi. Masalah-masalah itu, antara lain, infrastruktur, kesehatan, layanan masyarakat, dan pendidikan.

Atur distribusi

Menyikapi persoalan ini, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta berusaha mengatur ulang distribusi sampah. Hal ini mengingat pengurangan jalur truk bisa menimbulkan penumpukan sampah di Jakarta.

"Kami harus menata ulang pengiriman 1.300 truk sampah per hari karena ada jalur-jalur yang ditutup. Kami akan memaksimalkan rute di titik-titik

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

Bekasi Ajukan Evaluasi Kerja Sama

(Sambungan dari halaman 1)

tertentu," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Isnawa Adji.

Isnawa menginstruksikan agar para sopir truk sampah mengikuti aturan yang diterapkan Pemkot Bekasi. "Kami akan mematuhi truk yang lewat Bekasi Barat mulai pukul 21.00 hingga pukul 05.00," katanya.

"Uang bau"

Secara terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Solihin mengatakan, salah satu persoalan utama pada kasus ini adalah tak dipenuhinya janji bantuan keuangan. "Tahun ini, Pemkot Bekasi mengajukan dana hibah untuk beberapa pembangunan in-

frastruktur jalan Rp 500 miliar kepada DKI, tetapi tidak semua dipenuhi DKI," katanya.

Solihin menilai perjanjian itu merugikan warga Bekasi yang terganggu dengan kehadiran truk-truk sampah. Selain soal bantuan hibah, ada juga pelanggaran soal tonase sampah. "Menurut perjanjian, tonase sampah dari Jakarta hanya 3.000 ton per hari, tetapi sekarang tonase truk sampah bisa sampai 7.000 ton dalam satu hari," ujarnya.

Tahun ini Pemprov DKI Jakarta membayar Rp 194 miliar ke Pemkot Bekasi. Dana itu hasil verifikasi setelah Bekasi mengajukan Rp 202 miliar. Untuk tahun 2019, kewajiban dana kompensasi bau yang dibayarkan Rp 141 miliar. Kepala Biro Tata Pe-

merintahan Pemprov DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan, Pemkot Bekasi juga mengajukan proposal dana Rp 1 triliun untuk membangun dua jembatan layang dan pembebasan lahan.

"Kami memberi rekomendasi bantuan dana kemitraan. Dalam rapat Mei 2018, kami sudah meminta Pemkot Bekasi melengkapi proposal dengan dokumen perencanaan dan dokumen teknis," kata Premi.

Karena proposal lengkap baru masuk Senin lalu, Biro Tata Pemerintahan mengevaluasi dan membahas proposal itu. "Selanjutnya akan dibahas Tim Koordinasi Bantuan Keuangan dan diteruskan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan diteruskan ke DPRD," katanya. (E21/IRE/HLN)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 14)		
Resume	Waduk Dawuhan Menyusut		

Waduk Dawuhan Menyusut



KOMPAS/EDDY HASBY

Debit air di Waduk Dawuhan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (18/10/2018), menyusut karena musim kemarau. Kondisi ini dimanfaatkan petani sekitar waduk untuk menanam palawija dan sayuran di tepi waduk yang mengering.

Judul	Rehabilitasi Pun Dimulai	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Kompas (Halaman, 20)		
Resume	Rehabilitasi ribuan rumah warga yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat dimulai.		

Rehabilitasi Pun Dimulai

Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat di Lombok dan Sumbawa, Provinsi NTB, agar membangun rumah tahan gempa. Peluang gempa selalu ada dan perlu diantisipasi.

TALIWANG, KOMPAS — Rehabilitasi ribuan rumah warga yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat dimulai. Langkah ini terjadi menyusul dana bantuan stimulan pembangunan rumah terdampak gempa Rp 960 miliar sudah bisa dicairkan.

Pencairan dana bantuan stimulan pembangunan terdampak gempa di NTB disaksikan Presiden Joko Widodo. Salah satu lokasi pencairan yang dikunjungi Presiden adalah di Mobil Bank Rakyat Indonesia (BRI) di halaman Graha Fitrah di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Presiden mengikuti proses pencairan dana bantuan stimulan yang dilakukan sejumlah warga. Dimulai dengan mengisi formulir pengambilan dana sampai pencairan oleh kasir bank.

Hari Kamis kemarin, sebanyak 2.081 kepala keluarga dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa Besar menerima buku tabungan berisi dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah terdampak gempa dari pemerintah pusat. Presiden Jokowi mengharapkan masyarakat penerima segera mencairkan bantuan sehingga secepatnya membangun kembali rumah yang rusak.

"Kami harapkan semua segera mencairkan uangnya di bank yang sudah disiapkan sehingga secepatnya uang itu bisa dipakai untuk membangun rumah," kata Presiden Jokowi di hadapan warga yang hadir.

Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin menambahkan, sebenarnya dana stimulan itu sudah disalurkan pada 16-19 September lalu. Namun, masyarakat kesulitan mencairkan karena prosedur pencairan yang relatif rumit, yakni harus mengisi 17 lembar formulir.

Melihat tersendatnya pencairan bantuan, pada Senin lalu, Presiden menginstruksikan agar prosedur pencairan dipermudah. Akhirnya, masyarakat hanya diminta mengisi satu lembar formulir sebagai syarat pencairan dana bantuan.

Gubernur NTB Zulkiefliman-syah mengungkapkan, saat pe-

merintah menggunakan prosedur lama, hanya lima kepala keluarga yang berhasil mencairkan dana stimulan. Tetapi saat ini setelah prosedur disederhanakan, sudah 5.625 kepala keluarga yang mencairkan dana bantuan.

Selain Sumbawa Barat, kemarin, Presiden Jokowi juga melihat langsung pencairan dana stimulan perbaikan rumah di Lombok Timur. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei mengatakan, rehabilitasi rumah warga terdampak gempa akan dimulai pada Senin mendatang.

Tahan gempa

Dalam kunjungan ke Sumbawa Barat, Presiden Jokowi menyampaikan diri meninjau pembangunan rumah warga dengan model rumah instan sederhana sehat (risha) di Kecamatan Poto Tano. Selain mudah dan cepat dibangun, risha dirancang tahan terhadap guncangan gempa.

Kepada para korban gempa, Presiden juga berkali-kali mengingatkan agar membangun rumah tahan gempa. Potensi gempa masih ada, mengingat wilayah Indonesia berada di lingkaran cincin api. "Saya ingatkan, kita harus tahu karena kita berada di lingkaran cincin api, membangun rumahnya sekarang yang tahan gempa," katanya.

Masyarakat dibebaskan membangun rumah dengan teknologi apa pun asalkan tahan gempa. Dengan demikian, rumah yang dibangun tidak akan roboh saat gempa terjadi.

Saat ini Panglima TNI Marsial Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian kembali mengunjungi beberapa daerah yang tertimpa bencana. Menutup kunjungannya di Lombok, Hadi menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo. Jumat (19/10) ini, rombongan akan melanjutkan perjalanan ke Palu.

"Pergeseran personel ke Palu sudah kita hitung, masalah kesehatan di Lombok sudah bisa ditangani pemerintah setempat," kata Panglima TNI.

(NTA/RUL/EDN)



KOMPAS/ANITA YOSSUHARA

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan rumah instan sederhana sehat (risha) di Desa Senayan, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (17/10/2018). Kepala negara mengimbau masyarakat terdampak gempa untuk membangun kembali rumah mereka dengan teknologi tahan gempa karena Indonesia merupakan negara yang berada di jalur cincin api dengan potensi gempa besar dan berulang.

Judul	WIKA Bersiap Lepas Kepemilikan Sumo	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	PT Wijaya Karya Tbk. Bersiap melepas kepemilikan sahamnya di PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, badan usaha jalan tol Surabaya - Mojokerto		

WIKA Bersiap Lepas Kepemilikan Sumo

JAKARTA — PT Wijaya Karya Tbk. bersiap melepas kepemilikan sahamnya di PT Jasamarga Surabaya Mojokerto, badan usaha jalan tol Surabaya—Mojokerto.

Irene Agustine & Rizki Maulana
redaksi@bisnis.com

Emiten berkode saham WIKA itu melakukan divestasi untuk menghimpun dana guna membiayai ruas tol baru.

Direktur Utama WIKA Tumiya mengatakan bahwa perseroan menargetkan divestasi di ruas tol Surabaya—Mojokerto (Sumo) bisa tuntas tahun ini.

Kendati demikian, dia tidak menyebutkan target perolehan dana dari pelepasan saham tersebut.

Di ruas Sumo, WIKA memiliki saham 20%, sisanya dimiliki PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebesar 55% dan PT Moeladi 25%.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), ruas Sumo sepanjang 36,27 kilometer beroperasi secara bertahap, mulai dari 2011, 2016, dan 2017.

PT Jasamarga Surabaya Mojokerto memiliki konsesi pengusahaan jalan tol selama 42 tahun dan baru berakhir pada 2049.

Tumiya menjelaskan bahwa divestasi merupakan bagian dari strategi WIKA dalam investasi di bisnis jalan tol.

Dengan divestasi, WIKA bakal mendapat penambahan ekuitas baru yang selanjutnya bisa digunakan untuk mendanai investasi di proyek lain.

"Saat kami jual, itu peningkatan ekuitas. Kami enggak mau nunggu lama-lama karena di [bisnis] tol, 5 tahun itu masih bleeding," ujarnya ketika berkunjung ke *Bisnis Indonesia*, Rabu (17/10).

Berdasarkan laporan keuangan WIKA per Juni 2018, perseroan telah menanam modal Rp201,41 miliar di PT Jasamarga Surabaya Mojokerto. Total investasi pembangunan tol Sumo mencapai Rp3,79

► Sejumlah pihak tertarik mengambil alih saham WIKA di PT Wijaya Karya Serang Panimbang.

► Kementerian PUPR akan membahas penolakan pembangunan tol Bawen—Yogyakarta dengan pemda di Jateng.

triliun.

Selain ruas Sumo, WIKA juga berniat melakukan divestasi di ruas Serang—Panimbang.

Tumiya mengaku bahwa sejumlah pihak sudah menyatakan ketertarikan mereka untuk mengambil alih saham perseroan di PT Wijaya Karya Serang Panimbang, badan usaha jalan tol (BUJT) yang mengoperasikan ruas tol tersebut. Di BUJT tersebut, WIKA menguasai saham hingga 80%.

Jalan tol Serang—Panimbang dibangun sepanjang 83,68 kilometer dan menjadi akses baru ke kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung.

Pemerintah juga membantu kegiatan proyek tersebut dengan membangun jalan tol sepanjang 33 kilometer, sisanya sepanjang 50,68 kilometer menjadi porsi BUJT. Total investasi pembangunan jalan tol di ruas ini adalah Rp11,38 triliun.

Di samping ruas Sumo dan Serang—Panimbang, WIKA juga berpartisipasi dalam pengusahaan lima ruas tol lainnya.

WIKA turut menanam modal di PT Jasamarga Manado Bitung dengan porsi saham 20% dan 25% di PT Citra Marga Lintas Jabar.

Dalam porsi yang lebih kecil, WIKA juga berpartisipasi di PT Jasamarga Balikpapan Samarinda sebesar 15%. WIKA juga masih memiliki saham kurang dari 5% di PT Marga Kunciran Cengkareng dan PT Jasamarga Bali Tol.

Laporan keuangan WIKA menunjukkan bahwa total investasi di lima ruas tersebut mencapai Rp446,78 miliar.

Pada perkembangan lain, WIKA juga siap menggarap proyek tol baru. Pekan lalu, perseroan membentuk konsorsium dengan PT Margatama Nusantara dan PT Summarecon Agung Tbk. untuk menginisiasi pembangunan jalan tol dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road sepanjang 25,35 kilometer.

Sebelumnya, bersama PT Hanson Infrastructure Internasional, WIKA juga sudah mengajukan prakarsa pembangunan tol Serpong—Majal.

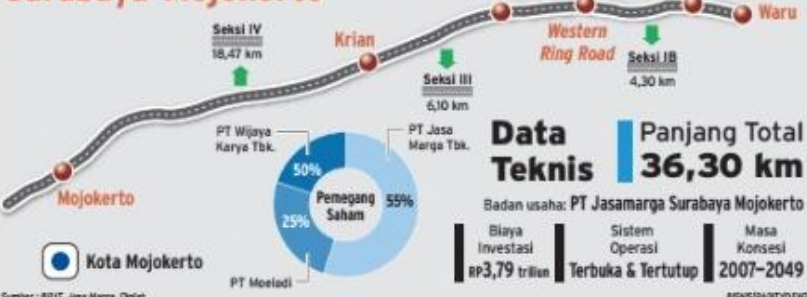
TOL BAWEN—YOGYAKARTA

Pada kesempatan berbeda, Kementerian

Jual Saham Bangun Jalan Tol Baru

Investor jalan tol kini mulai menuai hasil dari kegiatan menanam modal. Setelah pada tahun lalu PT Saratoga Investama Sedaya dan Surya Internusa kompak melepas kepemilikan saham mereka di jalan tol Cikopo—Palimanan, kini PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) berniat menyusul dengan menjual saham di tol Surabaya—Mojokerto atau Sumo. Meskipun hanya memiliki 20%, WIKA rela melepas sahamnya untuk menambah ekuitas.

Jalan Tol Ruas Surabaya-Mojokerto



Sumber: BPJT, Jasa Marga, Dirlat

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan membahas penolakan pembangunan tol Bawen—Yogyakarta sepanjang 71 kilometer oleh DPRD Jateng secara intensif dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Sugiyarto mengatakan bahwa sampai dengan saat ini penetapan trase belum diputuskan sehingga pembahasan akan turut mempertimbangkan alasan penolakan pembangunan proyek itu.

"Kami akan diskusikan dulu karena usulan pendok [penetapan lokasi] sendiri masih belum diputuskan apakah akan dibangun di kiri atau kanan jalan existing, apakah melintasi daerah persawahan atau tidak belum ada putusan," kata Sugiyarto kepada *Bisnis*, Kamis (18/10).

Dirjen Bina Marga juga akan mengkaji seberapa prioritasnya jalan tol tersebut untuk dibangun setelah pembangunan tol lainnya di wilayah itu juga tengah digencarkan.

Misalnya, proyek jalan tol Semarang—Solo yang sebagian ruasnya masih dalam proses konstruksi, Solo—Yogyakarta—Kulonprogo yang baru akan dimulai, serta Semarang—Demak yang masih dalam proses kualifikasi lelang.

Dengan banyaknya alternatif jalan tol di wilayah sekitar Yogyakarta—Bawen, Sugiyarto mengatakan bahwa kementerian akan mengkaji tingkat pengembalian investasi tol Bawen—Yogyakarta apakah masih tetap layak untuk bisa dibangun.

Apabila alternatif jalan tol yang tengah digagas untuk melintasi wilayah sekitar proyek dinilai sudah cukup, katanya, pemerintah akan mempertimbangkan kelanjutan status proyek strategis nasional (PSN) dalam pembangunan itu.

"Jika memang pemerintah setempat menilai itu tidak menjadi prioritas dan alternatif jalan tol yang ada nantinya sudah mencukupi untuk akses jalan, mungkin bisa status PSN ditarik. Namun, ini harus dikomunikasikan dan dikaji dulu," ujarnya.

Menurut Sugiyarto, saat ini pembangunan yang paling prioritas untuk dilakukan di wilayah itu adalah jalan tol Semarang—Demak yang pembangunannya akan sepaket dengan pengerjaan tanggul laut untuk mengatasi abrasi dan rob di sepanjang pantai utara Semarang.

Selain itu, jalan tol Solo—Yogyakarta—Kulonprogo juga dinilai dibutuhkan karena akan menyambung dengan ruas

tol Semarang—Solo.

Sebelumnya, rencana pembangunan jalan tol Bawen—Yogyakarta dengan perkiraan investasi Rp12,13 triliun tersebut dicoret dalam pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah yang dilakukan oleh DPRD pada awal pekan ini.

Alasannya, pertama, jalan tol tersebut dinilai memiliki manfaat yang sebanding atau ekuivalen dengan tol Semarang—Solo maupun Solo—Yogyakarta—Kulonprogo yang akan dikerjakan sehingga jika proyek itu dilakukan terkesan tidak efektif.

Kedua, penolakan proyek jalan tol Bawen—Yogyakarta dikarenakan komitmen Pemda Jateng yang ingin lebih fokus melakukan pengembangan transportasi massal melalui pembangunan jalur rel kereta.

Selain itu, DPRD juga menilai pembatalan pembangunan proyek yang merupakan prakarsa pemerintah tersebut dapat menghemat anggaran.

Sampai saat ini, proses pembangunan proyek tersebut masih dalam tahap penyajian yakni menetapkan lokasi trase.

Rencananya, proyek ini mulai dilakukan peninjauan minat pasar pada tahun depan. **2**

Judul	Sarana Danau Toba Dipacu	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat penyediaan sarana-prasarana infrastruktur di Sumatra Utara, khususnya di wilayah Danau Toba, seiring dengan diraihnya investasi swasta untuk pengembangan pariwisata destinasi itu.		

Sarana Danau Toba Dipacu

MEDAN — Pemerintah pusat dan daerah akan mempercepat penyediaan sarana-prasarana infrastruktur di Sumatra Utara, khususnya di wilayah Danau Toba, seiring dengan diraihnya investasi swasta untuk pengembangan pariwisata destinasi itu.

Ropesta Sitorus
ropesta.sitorus@bisnis.com

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba bersama tujuh calon investor, di sela-sela pertemuan tahunan IMF-WB pada pekan lalu di Bali, meneken perjanjian kerja sama investasi pengembangan Danau Toba. Total komitmen investasi yang disepakati mencapai Rp6,1 triliun atau sekitar US\$400 juta.

Ketujuh investor yang akan menggelontorkan modalnya di Danau Toba tersebut yakni PT Gaia Toba Mas, PT Agung Concem, PT Alas Rimbawan Lestari, PT Gamaland Toba Properti, PT Crystal Land Development, PT Asset Pacific, dan PT Arcs House - Jambuluwuk.

Kepala Grup Sistem Pembayaran BI Sumatra Utara Andiwiarna Septonarwanto mengatakan kesepakatan investasi tersebut menambah optimisme bahwa sektor pariwisata akan semakin berkembang di Sumut.

Andi, begitu dia biasa disapa, berharap komitmen dari para investor tersebut dapat segera direalisasikan agar optimalisasi kontribusi pariwisata terhadap

perekonomian Sumut dapat dipercepat. Bahkan tak tertutup kemungkinan pariwisata dapat menjadi sektor unggulan bagi perekonomian provinsi yang selama ini lebih mengandalkan komoditas.

"Apabila investasi ini bisa cepat direalisasikan kami juga optimis target 1 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumut bisa dicapai bahkan bisa terlampaui," katanya saat ditemui *Bisnis*, Rabu (17/10).

Andi mengatakan investasi swasta diperlukan untuk pengembangan fasilitas pendukung yang berstandar internasional seperti hotel dan resort hingga fasilitas lapangan golf.

Menurutnya, kawasan Danau Toba memerlukan fasilitas tersebut guna menangkap peluang wisata di waktu yang akan datang khususnya yang berkaitan dengan MICE seperti *meeting, incentives, conference*, dan *exhibition*.

Secara terpisah, pemerintah pusat menyatakan akan segera menuntaskan pembangunan fasilitas dasar untuk mewujudkan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata prioritas Indonesia.

Adapun pemerintah Provinsi Sumut akan segera membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata untuk meningkatkan penyediaan sumber daya manusia (SDM) terampil.

Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah se usai menghadiri

acara Wisuda XX Politeknik Pariwisata di Medan, Rabu (17/10).

"Semua utilitas dan fasilitas dasar seperti fasilitas jalan, air, listrik, dan internet di kawasan Danau Toba ditargetkan selesai tahun 2019," kata Arief.

Menurut Arief, pemerintah juga akan membangun infrastruktur pendukung lainnya untuk kebutuhan akomodasi, khususnya bangunan-bangunan yang dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Berbagai bangunan dan fasilitas tersebut akan dimulai pembangunannya pada tahun 2019.

"Kita mau membangun *nomadic tourism*, seperti namanya dia *nomadic* atau berpindah pindah, di sana akan ada hotel caravan pertama di Indonesia, *homepod*, serta *homestay*. Saya tidak janji akan selesai tahun 2019, tetapi akan *groundbreaking* 2019," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta kepada seluruh kepala daerah di kawasan Danau Toba untuk kompak mendukung upaya percepatan pembangunan kawasan tersebut agar berjalan lancar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengatakan Pemprov Sumut berencana membangun SMK Pariwisata di Sumut. Namun dia tidak merinci target pelaksanaan dan investasi yang akan digelontorkan pemerintah daerah.

"Tujuannya agar masyarakat setempat daerah wisata bisa betul betul mengelola daerahnya sendiri. Jangan sampai menjadi pembantu di rumah sendiri. Lulusan pariwisata harus bisa mengelola potensi daerahnya sendiri," ujarnya.

Pemprov Sumut juga akan berupaya menambah lapangan pekerjaan, khususnya di sektor pariwisata. Antara lain dengan mempermudah investor yang akan menanam modal di sektor wisata, seperti hotel dan lainnya.

"Masyarakat juga diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha. Bank Sumut ke depan juga bisa memberikan kredit untuk usaha kecil dan menengah, supaya bisa tumbuh dan berkembang di Sumut," kata Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Selain Danau Toba, imbuhan Ijeck, Sumut masih memiliki sejumlah potensi wisata berskala internasional yang juga perlu dikembangkan. Misalnya Bahorok yang habitat orang utan terbesar di dunia, Nias dengan lokasi surfing terbaik kedua di dunia, serta Asahan yang memiliki potensi arung jeram.

REALISASI

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Arie Prasetyo berharap komitmen investasi Rp6,1 triliun yang disepakati di sela-sela perhelatan IMF-WB dapat mulai direalisasikan pada akhir kuartal II/2018.

Nilai tersebut merupakan akumulasi investasi yang digunakan untuk membangun fasilitas akomodasi berupa hotel bintang 4 dan 5 di atas lahan yang dikelola BPODT di kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir.

Adapun skema investasinya berupa perjanjian sewa menyewa dengan hak guna bangunan untuk jangka panjang atau sekitar 30 tahun.

"Perjanjian ini melahirkan kewajiban di kedua pihak. Di sisi kami harus lebih serius menyusun *detail planning* dan *feasibility study*, serta menyiapkan infrastruktur seperti listrik, air dan internet. Di sisi investor dalam 6—8 bulan ini sudah harus bicara dengan hotel operator dan siapkan pendanaan sehingga target kami akhir kuartal II/2018 sudah ada *hoyel* yang *groundbreaking*," paparnya saat ditemui di kantornya, Kamis (18/10). 

► Semua utilitas dan fasilitas dasar seperti fasilitas jalan, air, listrik, dan internet di kawasan Danau Toba ditargetkan selesai 2019.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Foto Udara proyek pembangunan jembatan teluk kendari yang merupakan jembatan terpanjang ke – 3 di Indonesia.		



Antara/Jojon

Foto udara proyek pembangunan jembatan Teluk Kendari yang merupakan jembatan terpanjang ke-3 di Indonesia, di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis

(18/10). Pembangunan Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1.380 meter tersebut progresnya telah mencapai 60%.

Judul	Rantai Pasok Lebih Transparan	Tanggal	Jumat, 19 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Kementerian PUPR memproyeksikan rantai pasok material dan alat konstruksi akan lebih transparan sejalan dengan penerapan system informasi material dan peralatan konstruksi atau SIMPK		

► MATERIAL & ALAT KONSTRUKSI

Rantai Pasok Lebih Transparan

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat memproyeksikan rantai pasok material dan alat konstruksi akan lebih transparan sejalan dengan penerapan sistem informasi material dan peralatan konstruksi atau SIMPK.

Sistem ini diharapkan bisa berjalan penuh pada tahun depan.

Direktur Bina Kelembagaan & Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Bastian Sihombing mengatakan bahwa pihaknya masih terus mendorong para penyedia jasa maupun produsen material untuk berpartisipasi dalam sistem ini.

Dia mengakui bahwa data dari penyedia jasa dan produsen material belum seluruhnya terkumpul.

SIMPK menyediakan informasi ketersediaan alat berat, bahan material, dan peralatan konstruksi berdasarkan wilayah.

Bastian menyebutkan bahwa pengguna jasa atau pembeli ma-

terial bisa melakukan perhitungan lebih cermat dengan informasi dari SIMPK.

Saat ini, SIMPK merangkum informasi enam material, yakni semen, beton pracetak, baja ringan, baja konstruksi, aspal minyak, dan aspal buton.

Selain itu juga tersedia informasi alat produksi seperti *batching plant* dan *asphalt mixing plant*. Sistem ini juga menampilkan penyedia jasa penyewaan alat berat di seluruh daerah.

"Mereka bisa tahu, ada alat di wilayah ini, lalu mereka bisa buat perhitungan dan kebutuhan investasinya. Jadi, mereka melakukan perhitungan itu tidak gelap," ujarnya kepada *Bisnis*, Rabu (17/10).

Menurutnya, material dan alat berat yang didaftarkan di SIMPK harus memenuhi kualifikasi. Material baja, misalnya, harus memiliki sertifikasi SNI, sedangkan kondisi alat berat juga harus prima.

Dia menekankan bahwa alat berat dengan kondisi ringkih tidak bisa didaftarkan. Dengan demikian, registrasi alat berat akan menjamin kualitas alat terjaga dengan baik.

Secara khusus, proses registrasi alat berat terus berjalan.

Bastian menyebutkan bahwa hingga saat ini sebanyak 30% dari populasi alat berat telah terdaftar.

Data SIMPK per 17 Oktober 2018 menunjukkan bahwa jumlah alat berat terdaftar mencapai 27.701 unit.

Jakarta masih mendominasi populasi alat berat terdaftar sebanyak 4.209 unit atau 15,19%, sedangkan Kepulauan Riau menjadi provinsi dengan jumlah alat berat terdaftar paling sedikit, yakni hanya 66 unit.

Selain ketersediaan alat, SIMPK juga menyediakan informasi harga sehingga pasar sewa alat berat bisa dipantau secara langsung.

(Rivki Maulana)